



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Hutama Karya Dapat Jaminan		
Date	3 Mar 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TRANS-SUMATRA

## Hutama Karya Dapat Jaminan

JAKARTA—Pemerintah telah sepakat dan menyetujui penunjukan PT Hutama Karya untuk menggarap proyek jalan tol trans-Sumatra, tetapi tidak menjadi solusi tunggal.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan sebelumnya memang pemerintah sempat ragu mengenai penguasaan tersebut.

Pasalnya, dalam penguasaan terhadap BUMN Konstruksi itu dibutuhkan penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan dari pemerintah untuk perseroan agar dapat meningkatkan permodalannya melalui pinjaman.

"Itu yang kemarin yang bikin Menteri Keuangan ragu. Apakah ketika HK [Hutama Karya] cari pinjaman ada jaminan atau tidak," katanya, Jumat (28/2).

PNM dan jaminan diberikan langsung kepada Hutama Karya, bukan kepada anak perusahaan (*special purpose vehicle/SPV*) yang akan menjadi badan usaha per ruas jalan tol yang digarap.

Dengan demikian, pengelolaan dana dan jaminan akan langsung dipegang oleh Hutama Karya, sebagai *holding* dari SPV tersebut.

Terkait dengan PMN yang akan disertakan pada tahun ini, Djoko menyampaikan pemerintah sudah mengalokasikan Rp5,1 triliun dalam dana cadangan APBN.

"Begitu perpres diteken, kemudian dibahas dengan Menkeu dan DPR. Jadi kira-kira kalau lancar, PMN baru keluar pada Oktober nanti," paparnya.

Namun, jika perpres tidak kunjung terbit

pada 2014, pagu tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dia juga menegaskan rencana PMN tahun lalu Rp2 triliun, tidak lagi dialokasikan pada tahun ini karena sudah masuk sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2013.

Lebih lanjut, Djoko menuturkan pemerintah tetap akan menyediakan skema penggarapan jalan tol trans-Sumatra disamping penugasan terhadap Hutama Karya.

Hal tersebut dibutuhkan jika perusahaan pelat merah itu tidak dapat mengerjakan tugasnya dan tidak bisa dilimpahkan kepada BUMN lainnya karena adanya PMN.

"Itu pertanyaan saya. 23 Ruas itu kan diberikan kepada yang ditunjuk. Kalau ada apa-apa harus ada *exit*-nya. Itu nanti yang kira-kira akan ditambahkan beberapa ayat dalam rancangan perpresnya," tutur Djoko.

Oleh karena itu, dalam perpres penugasan nanti, pemerintah telah menyepakati pasal yang mengatur jalan keluar jika pembangunan jalan tol trans-Sumatra terhambat karena ketidakmampuan Hutama Karya.

Pasal tersebut diperkuat dengan penyusunan *service level agreement* (SLA). Menurutny, isi dari SLA tersebut merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hutama Karya, seperti target-target yang harus dicapai dan sebagainya.

Jika tidak tercapai, pemerintah akan membuka tender untuk ruas lainnya yang dinilai layak dan membuka peluang bagi badan usaha lainnya. (Dimas Novita S.)